

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS LITERASI DAN NUMERASI DI KABUPATEN KARAWANG

Dakka Jakkiel Manalu
NPP. 32.0362

Asdaf Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: jekkimanalu12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. H. Endang Try Setyasih, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The quality of education in Karawang Regency is still low, reflected in the achievement of student literacy and numeracy that has not met national standards and the education index is below the average of West Java Province. The inequality of distribution of educational resources, weak coordination between stakeholders, and less than optimal supervision are the main obstacles in implementing policies to improve the quality of education. Purpose:* This study aims to analyze the implementation of literacy and numeracy-based education policies by the Karawang Regency Government. **Method:** *The study used a descriptive qualitative method with in-depth interview techniques, observation, and documentation of 17 relevant informants. Marilee S. Grindle's policy implementation theory was used as an analytical tool. Result:* The results of the study indicate that policy implementation has not been running optimally. Several programs such as teacher training and literacy movements have been implemented, but there are still obstacles in the distribution of resources, coordination between institutions, and weak program evaluation. **Conclusion:** *In conclusion, although the policy content is in accordance with the objectives of improving the quality of education, the effectiveness of its implementation is still hampered by structural and cultural factors. Therefore, strengthening the capacity of implementers, improving supporting facilities, and optimizing cross-sector coordination are very necessary.*

Keywords: *Policy implementation, quality of education, literacy, numeracy, Karawang Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Mutu pendidikan di Kabupaten Karawang masih rendah, tercermin dari capaian literasi dan numerasi siswa yang belum memenuhi standar nasional dan indeks pendidikan yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 17 informan yang relevan. Teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle digunakan sebagai pisau analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Beberapa program seperti pelatihan guru dan gerakan literasi telah dilaksanakan, namun masih ditemukan kendala dalam distribusi sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan lemahnya evaluasi program. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, meskipun konten kebijakan telah sesuai dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan, efektivitas

implementasinya masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan fasilitas pendukung, dan optimalisasi koordinasi lintas sektor sangat diperlukan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, mutu pendidikan, literasi, numerasi, Kabupaten Karawang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era global. Kualitas pendidikan yang rendah akan berdampak pada keterbatasan kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, serta beradaptasi terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, mutu pendidikan masih menjadi permasalahan serius, terutama dalam aspek literasi dan numerasi yang menjadi indikator utama dalam mengukur capaian pembelajaran dasar. Hasil survei *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal kemampuan literasi dan numerasi (Iesha, 2023), yang menandakan lemahnya kompetensi dasar peserta didik.

Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Karawang, yang berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah usia 5–6 tahun hanya mencapai 69,53%, kemampuan literasi siswa SD sebesar 51,81%, SMP sebesar 61,70%, serta kemampuan numerasi siswa SD sebesar 40,02% dan SMP sebesar 53,40%. Capaian ini berada jauh dari target ideal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di daerah tersebut. Bahkan, berdasarkan Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, Kabupaten Karawang menempati tujuh posisi terendah dengan skor 60,39 poin, di bawah rata-rata provinsi sebesar 64,32 poin (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022).

Upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Asesmen Nasional (AN), dan Kurikulum Merdeka. Secara spesifik, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan yang responsif terhadap tantangan lokal. Beberapa program turunan, seperti Gebyar Literasi Karawang dan Gerakan Pemulihan Pembelajaran (Gerak Mulia), telah diinisiasi untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala serius, seperti dominasi kegiatan seremonial, kurangnya integrasi program antar sektor, serta terbatasnya dukungan infrastruktur pendidikan (Bahtiar, 2023).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis implementasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan aspek literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamdi (2014) yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perancangannya, tetapi juga oleh keterlibatan aktif para pelaksana dalam setiap tahapan kebijakan, termasuk implementasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pemerintah

daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam aspek literasi dan numerasi. Selain itu, penelitian juga mengangkat pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya capaian literasi dan numerasi. Permasalahan ini relevan untuk dikaji secara mendalam mengingat capaian pendidikan di Kabupaten Karawang masih tergolong rendah, baik dari segi partisipasi pendidikan maupun skor kemampuan dasar siswa.

Secara umum, studi-studi terdahulu telah banyak membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, manajemen mutu pendidikan, dan pelaksanaan program literasi di sekolah dasar. Namun, mayoritas penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti keterkaitan antara kebijakan pendidikan berbasis Peraturan Daerah dengan indikator peningkatan mutu seperti literasi dan numerasi, khususnya di daerah dengan indeks pendidikan yang rendah. Kajian yang tersedia pun cenderung berfokus pada tataran konsep atau kebijakan nasional tanpa mempertimbangkan kompleksitas implementasi di tingkat lokal.

Kesenjangan lain yang ditemukan adalah minimnya penelitian yang menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan secara komprehensif untuk melihat bagaimana faktor struktural, kultural, serta kapasitas aktor pelaksana berkontribusi dalam menentukan efektivitas kebijakan pendidikan. Padahal, dalam konteks daerah seperti Kabupaten Karawang yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam, faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi hasil dari kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang tidak hanya menjelaskan isi kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan direspons oleh berbagai pihak di lapangan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang, menggunakan teori implementasi kebijakan (Marilee S. Grindle, 1980). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan substansi kebijakan, tetapi juga menganalisis dinamika implementasinya dalam konteks lokal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi kebijakan publik, serta menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, efektif, dan kontekstual.

1.3. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat landasan konseptual dalam penelitian ini, penulis mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi kebijakan dan mutu pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pendidikan telah diimplementasikan dalam berbagai konteks serta sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal literasi dan numerasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafii dkk. (2023) mengembangkan metode pengukuran indeks mutu pendidikan berbasis standar nasional. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terukur dalam mengevaluasi mutu pendidikan secara komprehensif. Selanjutnya, penelitian oleh Rahman dkk. (2023) menelaah implementasi manajemen mutu terpadu di SD Sekolah Alam Bogor. Mereka menemukan bahwa penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian yang terstruktur mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.

Penelitian lain oleh Barlian & Solekah (2022) membahas keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun berhasil diterapkan, penelitian ini menggarisbawahi perlunya penguatan pada aspek evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, penelitian oleh Ramadhani (2022) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti kesiapan siswa, kompetensi guru, dan partisipasi masyarakat merupakan penentu utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari (Marilee S. Grindle, 1980) dan Edward III (1980) sebagai kerangka analisis.

Terakhir, penelitian oleh Handayani (2020) menelusuri implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah PK Jogonalan. Ia menemukan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan di sekolah. Temuan ini senada dengan kerangka teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang juga digunakan dalam penelitian ini.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi berarti, namun belum ada yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan serta efektivitasnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. Penelitian ini juga menawarkan pembaruan dari segi konteks lokal serta integrasi antara teori dan praktik kebijakan pendidikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena secara khusus menyoroti implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi yang diterapkan melalui kebijakan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018. Fokus penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas mutu pendidikan dari sudut pandang kurikulum nasional atau manajemen mutu internal sekolah. Penelitian ini menghadirkan analisis yang lebih kontekstual dengan menelaah bagaimana kebijakan tingkat daerah dijalankan dan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam capaian literasi dan numerasi peserta didik.

Selain itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan (Marilee S. Grindle, 1980) untuk menganalisis dua dimensi penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu konten kebijakan dan konteks implementasinya. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam penelitian terdahulu yang cenderung hanya menekankan pada aspek formal kebijakan atau efektivitas program tanpa memetakan faktor-faktor struktural, kultural, dan kepentingan aktor yang terlibat dalam implementasinya.

Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan data empirik dari lapangan, seperti wawancara dengan 17 informan kunci yang mewakili berbagai elemen pelaksana pendidikan di daerah, termasuk Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pendekatan partisipatif ini menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai bagaimana kebijakan literasi dan numerasi dijalankan, serta hambatan nyata yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya berfokus pada tataran normatif atau deskriptif, tetapi juga menghadirkan analisis kritis terhadap praktik implementasi kebijakan pendidikan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kebijakan publik di

bidang pendidikan serta memberikan masukan strategis bagi pengambil kebijakan, khususnya di daerah-daerah dengan karakteristik dan tantangan yang serupa.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan (Marilee S. Grindle, 1980). Tujuan ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, serta menelaah efektivitas program literasi dan numerasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dinilai paling sesuai untuk menggali secara mendalam proses implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi dalam konteks lokal Kabupaten Karawang. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Nurdin & Hartati (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Fokus penelitian ini bukan hanya pada hasil kebijakan, melainkan juga pada dinamika pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta respons para pelaksana dan penerima manfaat kebijakan di lapangan. Menurut Simangunsong (2019), penelitian pemerintahan yang bersifat kualitatif harus mampu menangkap dinamika kebijakan dan proses implementasinya secara utuh dalam konteks sosial dan birokratis yang melingkupinya. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk memperoleh data yang bersifat kontekstual dan bermakna.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi peran dan pengetahuan informan terhadap objek kajian. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dua orang kepala sekolah, empat orang tua siswa, serta delapan orang siswa jenjang SD dan SMP. Informan-informan ini dipilih karena keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan maupun dampak dari kebijakan literasi dan numerasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Teknik *snowball sampling* juga digunakan untuk menjangkau informan tambahan yang dinilai relevan oleh informan sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Karawang, dengan lokasi utama penelitian berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta beberapa satuan pendidikan yang menjadi pelaksana kebijakan literasi dan numerasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994). Sugiyono (2019) juga menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang valid dan mendalam. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan, digunakan teori implementasi dari Marilee S. Grindle (1980) yang menyoroti dua dimensi utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context*

of implementation (konteks implementasi), guna menilai secara menyeluruh efektivitas dan tantangan dalam penerapan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, serta satuan pendidikan terkait, implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi dianalisis menggunakan pendekatan teori implementasi (Marilee S. Grindle, 1980). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan temuan-temuan lapangan ke dalam dua dimensi tersebut untuk memahami faktor pendukung, hambatan struktural dan kultural, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis yang kontekstual, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang.

3.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pendekatan dari Aspek Literasi dan Numerasi di Kabupaten Karawang

Dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pendidikan, khususnya dalam aspek literasi dan numerasi. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah “Gerakan Pemulihan Pembelajaran melalui Literasi dan Numerasi” (Gerak Mulia), yang mengacu pada pedoman nasional dalam penguatan kemampuan dasar siswa. Program ini mencakup penyediaan buku berkualitas, pengoptimalan fungsi perpustakaan, serta pelibatan masyarakat dalam membangun budaya baca dan hitung. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Drs. Cecep Mulyawan, selaku Plt. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, yang menjelaskan bahwa program Gerak Mulia serta PBR (Pemberantasan Buta Raraban) dirancang untuk memastikan siswa menguasai kemampuan membaca dan berhitung sejak dini. Program ini juga didukung oleh asesmen berkala, dan berdasarkan data SPM 2024, skor literasi meningkat dari 59,55 menjadi 68,78 (naik 15,50%) serta skor numerasi meningkat dari 49,50 menjadi 63,53 (naik 28,34%).

Penerapan kebijakan tersebut turut melibatkan partisipasi aktif para guru dan kepala sekolah. Kepala SDN 3 Rengasdengklok, Ibu Aat Emdari, M.Pd., dalam wawancaranya menyampaikan bahwa sekolahnya melaksanakan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk menumbuhkan kebiasaan literasi sejak dini. Selain itu, pendekatan numerasi juga diterapkan melalui integrasi soal-soal kontekstual dalam proses pembelajaran. Guru-guru pun secara rutin mengikuti pelatihan dari dinas maupun komunitas belajar guna menyelaraskan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2024–2025, dengan harapan dapat meningkatkan capaian asesmen nasional yang mencerminkan mutu pendidikan di Kabupaten Karawang.

Implementasi program Gerak Mulia telah berjalan di berbagai sekolah, salah satunya ditunjukkan melalui kegiatan di SMPK Iman Karawang yang menjadi contoh penerapan nyata di lapangan. Berdasarkan data SPM 2024, Kabupaten Karawang mencatat peningkatan skor literasi dan numerasi sebesar 10–15 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan dinas. Konsistensi dalam pelaksanaan, pelibatan aktor pendidikan, serta penguatan evaluasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan literasi dan numerasi tersebut.

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Karawang

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980) yang mencakup dua dimensi utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yang akan dijelaskan pada uraian berikut.

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dimensi isi kebijakan dalam teori Merilee S. Grindle (1980) berfokus pada unsur substansi yang terdapat dalam suatu kebijakan dan bagaimana unsur-unsur tersebut memengaruhi proses serta keberhasilan implementasinya. Dalam konteks kebijakan peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang, enam indikator utama digunakan untuk menganalisis efektivitas isi kebijakan, yaitu: kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, jangkauan perubahan, kedudukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya. Masing-masing indikator ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Kepentingan yang memengaruhi implementasi melibatkan aktor-aktor dengan peran dan ekspektasi yang berbeda, seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pemerintah memiliki kepentingan dalam peningkatan indeks pendidikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Dinas Pendidikan berperan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai prosedur. Sementara itu, sekolah dan guru lebih fokus pada pelaksanaan teknis serta kebutuhan riil di kelas. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketidakharmonisan, terutama ketika kebijakan bersifat top-down dan tidak mempertimbangkan suara pelaksana di lapangan. Kepala sekolah menyampaikan perlunya fleksibilitas dalam mengadaptasi kebijakan terhadap realitas sekolah yang beragam. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

Jenis manfaat yang dijanjikan oleh kebijakan literasi dan numerasi cukup luas. Untuk siswa, manfaatnya mencakup peningkatan keterampilan dasar membaca dan berhitung yang sangat penting dalam mendukung capaian pembelajaran lintas mata pelajaran. Bagi guru, manfaatnya berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas pedagogik. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki peringkat pendidikan secara nasional dan regional. Namun demikian, manfaat ini belum merata dirasakan. Sekolah-sekolah dengan keterbatasan infrastruktur dan SDM belum sepenuhnya dapat menjalankan program dengan maksimal. Kurangnya bahan ajar berkualitas, minimnya partisipasi orang tua, dan kesenjangan teknologi juga menjadi kendala dalam pemerataan manfaat kebijakan ini.

Jangkauan perubahan yang diharapkan mencakup peningkatan signifikan dalam hasil Asesmen Nasional dan perbaikan indeks mutu pendidikan di tingkat kabupaten. Target ini menunjukkan arah kebijakan yang ambisius, tetapi memerlukan kesiapan sistemik dalam pelaksanaannya. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan skor literasi dan numerasi, hal ini belum menyentuh seluruh lapisan sekolah secara merata. Banyak sekolah yang belum memiliki kapasitas memadai dalam mengelola program, terutama di daerah tertinggal atau padat penduduk. Perubahan dalam dunia pendidikan tidak bisa terjadi secara instan, melainkan memerlukan keberlanjutan program, evaluasi

reguler, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Tanpa kesinambungan dan pendampingan, perubahan yang ditargetkan berisiko menjadi simbolik semata.

Kedudukan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tingkat pusat daerah, yakni oleh pemerintah kabupaten dan Dinas Pendidikan. Proses formulasi kebijakan yang kurang melibatkan sekolah dan guru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Hal ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan bersifat administratif dan kurang solutif. Sekolah sering kali hanya menjadi pelaksana tanpa memiliki ruang untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik mereka. Dalam praktiknya, guru dan kepala sekolah adalah aktor terdepan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga partisipasi mereka dalam tahap perumusan sangat penting. Pendekatan yang lebih partisipatif akan membantu menciptakan kebijakan yang responsif, realistis, dan implementatif.

Pelaksanaan program mencakup aktivitas konkret seperti Gerakan Pemulihan Pembelajaran melalui Literasi dan Numerasi (Gerak Mulia) serta Pemberantasan Buta Raraban (PBR). Di sekolah, program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan membaca sebelum belajar, asesmen numerasi berkala, dan pelatihan guru. Pelaksanaannya menunjukkan respons positif di beberapa sekolah, terutama yang telah memiliki budaya baca yang baik. Namun, implementasi belum berjalan seragam. Beberapa sekolah masih menjalankan program sebagai formalitas tanpa pemahaman substansi. Tantangan dalam pelaksanaan antara lain keterbatasan waktu, kurangnya bahan ajar yang menarik, serta minimnya supervisi dan evaluasi program. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan membutuhkan bimbingan teknis, kejelasan indikator keberhasilan, dan keterlibatan aktif dinas dalam pendampingan lapangan.

Sumber daya menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan dana, bahan ajar, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program. Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran cukup besar, namun distribusinya belum merata. Sekolah-sekolah di wilayah pinggiran dan pedesaan mengalami kekurangan buku, perpustakaan yang kurang representatif, serta guru yang belum terlatih dalam pendekatan literasi-numerasi. Selain itu, pelibatan orang tua juga belum maksimal, terutama di lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah. Kesenjangan sumber daya ini memperlebar ketimpangan dalam pencapaian antar sekolah. Oleh karena itu, pemerataan distribusi sumber daya, baik fisik maupun manusia, menjadi keharusan jika ingin mencapai hasil implementasi yang adil dan merata.

Secara keseluruhan, dimensi isi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang telah memuat komponen penting dalam struktur kebijakan publik. Namun, kompleksitas kepentingan aktor, ketimpangan distribusi manfaat dan sumber daya, serta minimnya partisipasi pelaksana di tahap perumusan kebijakan masih menjadi tantangan utama. Untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara desain, tetapi juga sensitif terhadap konteks implementasi di lapangan. Pelibatan aktor sekolah, perbaikan alur koordinasi, dan penguatan kapasitas pelaksana adalah langkah kunci dalam menjadikan kebijakan ini benar-benar berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan di Karawang.

b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Selain isi kebijakan, faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi adalah lingkungan implementasi. Merilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan administratif di mana kebijakan tersebut diterapkan. Lingkungan implementasi mencakup distribusi kekuasaan, kepentingan aktor, serta karakteristik kelembagaan birokrasi yang dapat memperkuat atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Kabupaten

Karawang, dinamika antar aktor serta kelembagaan pendidikan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan kebijakan literasi dan numerasi.

Faktor pertama adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Karawang melibatkan banyak aktor seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Namun, ketidakseimbangan dalam distribusi kewenangan serta perbedaan kepentingan sering kali menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal. Kebijakan yang diterapkan secara top-down tanpa pelibatan aktif sekolah membuat pelaksana di lapangan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Beberapa kepala sekolah menyatakan perlunya fleksibilitas dan ruang adaptasi agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai konteks sekolah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah dan pelaksana kebijakan menjadi penting agar implementasi berjalan efektif dan adil.

Faktor kedua adalah karakteristik lembaga dan otoritas yang menjalankan kebijakan. Dalam praktiknya, struktur birokrasi pendidikan di Kabupaten Karawang masih menghadapi tantangan dari sisi koordinasi dan efisiensi. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara dinas pendidikan dan pihak sekolah yang kerap memperlambat proses implementasi. Seperti yang diungkapkan oleh Hamid (2018), lemahnya tata kelola pemerintahan daerah dan birokrasi yang berbelit dapat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan publik secara efektif di tingkat lokal. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi masih belum berjalan optimal, karena pelaporan program masih dilakukan secara manual dan menyita waktu guru. Kompleksitas birokrasi ini menyebabkan kebijakan yang telah dirancang memerlukan waktu lama untuk sampai pada tahap operasional di sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa penyederhanaan prosedur administratif dan pemanfaatan sistem pelaporan digital yang efisien sangat dibutuhkan agar pelaksana dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Secara keseluruhan, dimensi lingkungan implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh seberapa baik aktor-aktor kunci berinteraksi dan seberapa efisien sistem kelembagaan dalam mendukung pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antar aktor, pelibatan pelaksana sejak tahap perencanaan, serta reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan.

3.3. Upaya Mengatasi Permasalahan Rendahnya Mutu Pendidikan di Kabupaten Karawang dari Aspek Literasi dan Numerasi

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang perlu difokuskan pada perbaikan substansi kebijakan serta konteks sosial, politik, dan administratif tempat kebijakan dijalankan, agar implementasinya dapat berlangsung lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Upaya dalam Dimensi Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang adalah memperkuat keterlibatan para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang lebih intens dengan sekolah dan tenaga pendidik agar kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi pendekatan bottom-up. Forum diskusi rutin yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua menjadi penting agar

kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Seperti disampaikan oleh Ibu Aat Emdari M.Pd, Kepala Sekolah SDN 3 Rengasdengklok, banyak sekolah merasa belum dilibatkan secara memadai dalam proses perumusan kebijakan, sehingga menyulitkan mereka dalam implementasi di sekolah masing-masing.

Selain itu, pemerataan sumber daya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024 menunjukkan bahwa meskipun skor literasi dan numerasi meningkat, keduanya masih berada di bawah target nasional. Ketimpangan fasilitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pelosok menjadi salah satu penyebabnya, di mana akses terhadap bahan ajar, perpustakaan, dan guru berkualitas masih belum merata. Hal ini diperkuat oleh pernyataan siswa SDN 3 Rengasdengklok, Mauren Nadeak, yang menyebutkan rendahnya minat baca karena keterbatasan variasi buku yang tersedia. Di sisi lain, pelatihan guru yang belum merata juga menjadi hambatan dalam penerapan metode yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan yang terstruktur, berbasis teknologi, serta didampingi oleh fasilitator kompeten untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyampaikan materi literasi dan numerasi secara lebih interaktif dan kontekstual.

b. Upaya dalam Dimensi Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Dari sisi lingkungan implementasi, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi langkah krusial untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang. Sejalan dengan hal ini, Coburn & Penuel (2016) menekankan pentingnya *research-practice partnerships* sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan antara peneliti dan praktisi pendidikan, guna menciptakan kebijakan yang lebih kontekstual, berbasis bukti, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak dapat segera diimplementasikan secara efektif. Proses birokrasi yang kompleks juga menjadi hambatan, di mana sekolah kerap kesulitan memperoleh dukungan administratif dan teknis yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan birokrasi serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk mempercepat proses pelaporan dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dye (2017), yang menyatakan bahwa lingkungan politik dan kepentingan para aktor memiliki pengaruh besar terhadap arah serta keberhasilan suatu kebijakan publik. Jika pelaksana tidak dilibatkan secara aktif, atau jika terjadi ketimpangan kekuasaan antar aktor, maka kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal dalam implementasinya. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan juga harus didasarkan pada indikator yang jelas, seperti peningkatan skor asesmen nasional. Berdasarkan data SPM 2024, indeks pendidikan Kabupaten Karawang masih tertinggal 3,39 poin dari rata-rata Jawa Barat, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih sistematis dan terarah.

Selain penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Orang tua dan komunitas perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran agar penguatan literasi dan numerasi tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu orang tua siswa, Ibu Putri, yang menyatakan bahwa komunikasi dari sekolah sangat membantu mereka memahami peran yang bisa diambil di rumah. Dengan demikian, diperlukan inisiatif dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program kampanye literasi berbasis komunitas dan kegiatan edukatif yang mendorong peran aktif orang tua. Melalui pendekatan kolaboratif antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berbasis literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal. Kebijakan telah dijalankan melalui program seperti “Gerakan Pemulihan Pembelajaran melalui Literasi dan Numerasi” (Gerak Mulia) dan PBR (Pemberantasan Buta Raraban), namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural seperti distribusi sumber daya yang belum merata, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lemah, serta keterbatasan pelibatan aktor pelaksana di tingkat sekolah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rahman dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sistem manajemen mutu terpadu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan secara struktural dan partisipatif.

Sama halnya dengan temuan Handayani (2020) yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan, penelitian ini juga menemukan bahwa tumpang tindih wewenang antara Dinas Pendidikan dan sekolah, serta sistem pelaporan yang masih manual, menjadi hambatan nyata di lapangan. Selain itu, pelibatan sekolah dalam proses perumusan kebijakan masih terbatas, sehingga banyak kepala sekolah merasa tidak memiliki ruang adaptasi terhadap kebijakan yang berlaku. Temuan ini sekaligus menolak pendekatan *top-down* yang terlalu dominan, sebagaimana juga dikritisi dalam temuan Barlian & Solekah (2022) terkait implementasi Kurikulum Merdeka yang belum mempertimbangkan masukan dari pelaksana di tingkat sekolah dasar.

Temuan lain yang signifikan adalah masih adanya kesenjangan dalam manfaat dan hasil yang diperoleh antar sekolah. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan memiliki fasilitas lebih memadai cenderung menunjukkan peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih signifikan dibandingkan sekolah-sekolah di daerah pelosok. Berbeda dengan penelitian Ramadhani (2022) yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan kesiapan siswa sebagai kunci utama keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah, partisipasi masyarakat tidak cukup kuat untuk menutup kesenjangan tersebut. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keadilan distribusi sumber daya antar wilayah.

Dari sisi pendekatan teoritik, penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980) yang menekankan dua dimensi utama implementasi: *content of policy* dan *context of implementation*. Teori ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami tidak hanya apa isi kebijakan tersebut, tetapi juga bagaimana kebijakan diterjemahkan di lapangan. Berbeda dari penelitian Syafii dkk. (2023) yang lebih berfokus pada pengukuran indeks mutu pendidikan berbasis indikator nasional, penelitian ini justru menempatkan konteks lokal sebagai landasan utama dalam menilai efektivitas kebijakan, termasuk dinamika interaksi antar aktor pelaksana di tingkat daerah. Sejalan dengan kritik tersebut, Au (2022) menyatakan bahwa penggunaan ujian berisiko tinggi sebagai dasar kebijakan pendidikan berpotensi memperkuat ketimpangan karena mengabaikan konteks sosial dan geografis sekolah. Pendekatan kebijakan yang hanya berorientasi pada capaian angka dapat memperburuk ketidakadilan bagi sekolah-sekolah yang kurang memiliki sumber daya. Hal ini menjadi kontribusi ilmiah tersendiri yang memperbarui pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan berbasis indikator semata menjadi evaluasi berbasis proses implementasi.

Dengan demikian, secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat beberapa hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menghadirkan dimensi pembeda dari segi pendekatan lokal, keterlibatan aktor pendidikan, dan integrasi teori implementasi secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dilihat dari rumusan program, tetapi harus ditinjau dari bagaimana kebijakan tersebut dipahami,

dijalankan, dan diterima oleh pelaksana di tingkat lapangan serta didukung oleh sistem birokrasi yang adaptif dan inklusif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan tingkat kesiapan dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan program literasi dan numerasi, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Guru-guru yang lebih muda umumnya lebih antusias dan adaptif terhadap pendekatan berbasis teknologi, sementara guru senior cenderung menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri. Hal ini diperkuat oleh temuan Akram *et al.* (2022) yang menyebutkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan kompetensi digital guru serta dukungan pelatihan dan infrastruktur. Ketimpangan dalam aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan perbedaan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di berbagai sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya model pelatihan yang disesuaikan dengan latar belakang kompetensi guru, agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

Selanjutnya, ditemukan bahwa beberapa sekolah telah mengembangkan inovasi lokal secara mandiri dalam mendukung literasi dan numerasi, seperti kegiatan tukar buku antarsiswa atau penggunaan cerita rakyat lokal dalam pembelajaran. Inisiatif ini muncul bukan karena instruksi langsung dari pemerintah daerah, tetapi karena kesadaran dan kreativitas internal sekolah. Hal ini memperkuat gagasan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada program formal dari pemerintah, tetapi juga pada kemampuan sekolah dalam mengadaptasi kebijakan secara kontekstual dan kreatif.

Temuan terakhir adalah adanya kesenjangan partisipasi orang tua dalam mendukung program literasi dan numerasi di rumah. Di sekolah-sekolah tertentu, orang tua cukup aktif terlibat dan berkomunikasi dengan pihak sekolah, namun di sekolah lain, terutama yang berada di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, partisipasi masih sangat terbatas. Beberapa orang tua bahkan mengaku kesulitan mendampingi anak belajar karena perbedaan cara belajar zaman sekarang dengan masa mereka. Ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi dan pemberdayaan orang tua secara lebih intensif agar peran mereka dalam mendukung kebijakan pendidikan di rumah dapat dioptimalkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah mengacu pada arah kebijakan nasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Merdeka Belajar. Namun, efektivitas implementasinya belum optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan, baik dari sisi isi kebijakan maupun lingkungan implementasinya.

Dari sisi *content of policy*, kebijakan telah mencerminkan arah yang jelas, tetapi masih terdapat tantangan dalam pemerataan manfaat, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pelibatan aktor lokal seperti guru dan kepala sekolah dalam proses perumusan kebijakan. Adapun dari sisi *context of implementation*, masih terdapat hambatan struktural seperti koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal, kompleksitas birokrasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program literasi dan numerasi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang seperti pelatihan guru, penguatan budaya literasi di sekolah, serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan langkah positif. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan tetap sangat

ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup informan yang sebagian besar berasal dari internal Dinas Pendidikan, sekolah, serta siswa dan orang tua di wilayah yang dapat diakses oleh peneliti. Perspektif dari pemangku kepentingan lain seperti komunitas literasi, organisasi masyarakat sipil, atau pihak swasta yang mungkin juga berkontribusi terhadap program literasi dan numerasi belum tergali secara mendalam. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif menjadikan hasil penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan informan agar mencakup lebih banyak aktor di luar institusi pendidikan formal, seperti organisasi masyarakat, tokoh literasi lokal, serta pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan pendidikan. Pendekatan *mixed-methods* (kualitatif dan kuantitatif) juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan secara lebih komprehensif dan objektif. Selain itu, penelitian longitudinal diperlukan untuk memantau perkembangan hasil kebijakan literasi dan numerasi dalam jangka menengah hingga panjang, sehingga dapat memberikan rekomendasi berkelanjutan bagi perbaikan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang relevan bagi kelengkapan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perumusan dan penguatan kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi dan numerasi di Kabupaten Karawang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akram, H., Abdelrady, A. H., Al-Adwan, A. S., & Ramzan, M. (2022). Teachers' Perceptions of Technology Integration in Teaching-learning Practices: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*, *13*, Article 920317. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.920317>
- Au, W. (2022). Unequal by design: High-stakes Testing and the Standardization of Inequality. *Educational Policy Analysis Archives*, *27*, 1–25. 10.4324/9781003005179
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022). *Indeks pendidikan, 2022 (1)*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxIzI=/indeks-pendidikan.html>
- Bahtiar, I. M. (2023). *Sekda Acep: Fasilitas perpustakaan minim, tingkat literasi di Karawang rendah*. INews Karawang. <https://karawang.inews.id/read/325755/sekda-acep-fasilitas-perpustakaan-minim-tingkat-literasi-di-karawang-rendah>
- Barlian, U. C. & Solekah, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*. *1(12)*, 2015-2118. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i12.3015>
- Coburn, C. E., & Penuel, W. R. (2016). Research-practice Partnerships in Education: A Critical Review. *Educational Policy Analysis Archives*, *24(18)*, 1-24. <https://doi.org/10.3102/0013189X16631750>

- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Edward, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Handayani, S. N. (2020). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. 9(3). 277-287. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3>
- Iesha, R. (2023). Literasi Indonesia Peringkat 62 dari 70, Apakah Peningkatan Kualitas Perpustakaan Daerah Bisa Membantu? *Whiteboard Journal*. <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/literasi-indonesia-peringkat-62-dari-70-apakah-peningkatan-kualitas-perpustakaan-daerah-bisa-membantu/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Rahman, N., Suharti, H., & Herfina. (2023). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 149-161. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.174>
- Ramadhani, M. A. (2022). Implementasi Mutu Pendidikan dalam Pembelajaran. *Seri Publikasi Pembelajaran*. 1(1). 1-12. <https://osf.io/jxh7y/download>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, A., Bahar, Shobichah, & Muharam, A. (2023). Pengukuran Indeks Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1697-1701. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332>